



ANALISIS RESEPSI KHALAYAK TERHADAP PEMBERITAAN “MAKAN SIANG GRATIS” DI MEDIA MASSA

Adira Dzaki Azizi¹, Nawiroh Vera²

Abstrak

Pemberitaan media massa saat kampanye pilpres yang baru lalu menyoroti salah satu program yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran yaitu “makan siang gratis”. Berita ini mendapat perhatian besar khalayak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resepsi/penerimaan khalayak terhadap berita tentang makan siang gratis ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang mewakili berbagai latar belakang sosial. Analisis dilakukan berdasarkan teori decoding-encoding dari Stuart Hall, yang menekankan bahwa khalayak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memberikan makna tersendiri terhadap pesan yang diterima sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ideologi masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga kategori utama resepsi khalayak, yaitu dominan-hegemonik, negosiasi, dan oposisi. Khalayak dengan resepsi dominan-hegemonik cenderung menerima pemberitaan sebagai bentuk kebijakan positif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Khalayak dengan resepsi negosiasi mengakui manfaat program ini, namun tetap kritis terhadap beberapa aspek pelaksanaannya, seperti efektivitas dan keberlanjutannya. Sementara itu, khalayak dengan resepsi oposisi cenderung memandang program makan siang gratis sebagai kebijakan yang kurang tepat sasaran dan tidak menyelesaikan masalah kesehatan secara menyeluruh, terkesan hanya retorika politik saja.

Kata kunci: analisis resepsi, media massa, khalayak, teori *encoding-decoding*.

¹ Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, email: adirazaki.ad@gmail.com

² Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, email: nawiroh.vera@budiluhur.ac.id

Abstract

Mass media coverage during the recent presidential election campaign highlighted one of the Prabowo-Gibran pair's programs, namely "free lunch". This news received great attention from the audience. This study aims to analyze the audience's reception of the news about this free lunch. This research is a type of qualitative research. Data were obtained through in-depth interviews with several informants representing various social backgrounds. The analysis was conducted based on Stuart Hall's decoding-encoding theory, which emphasizes that audiences do not only receive information passively, but also give their own meaning to the messages received according to their respective social, cultural and ideological contexts. The results show that there are three main categories of audience reception, namely dominant-hegemonic, negotiation, and opposition. Audiences with dominant-hegemonic receptions tend to accept the news as a form of positive policy that benefits the wider community. Audiences with negotiated receptions acknowledge the benefits of this program, but remain critical of some aspects of its implementation, such as its effectiveness and sustainability. Meanwhile, audiences with oppositional receptions tend to view the free lunch program as a policy that is less targeted and does not solve health problems as a whole, it seems that it is only political rhetoric.

Keywords: reception analysis, mass media, audience, encoding-decoding theory

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau pemilu merupakan proses krusial dalam sebuah struktur negara yang demokratis, di mana para wakil pemerintahan dipilih oleh penduduknya. Di Indonesia, para wakil tersebut nantinya akan duduk di bangku legislatif maupun eksekutif (Jurdi, 2018). Dalam hal ini, pemilu bersifat lebih dari sekadar elemen krusial dalam sistem demokrasi karena masyarakat memiliki peluang langsung untuk memengaruhi arah serta kebijakan pemerintahan (Fathurokhman, 2022). Hal tersebut juga didasari atas hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan menentukan wakil pemerintahan yang mewakili kepentingan mayoritas masyarakatnya.

Seiring berjalannya waktu, pemilu telah menjadi pilar utama dalam transformasi sosial dan politik di berbagai negara. Dalam banyak peristiwa, pemilu berfungsi sebagai panggung advokasi ideologi, kepentingan, serta aspirasi politik (Kamuli *et al.*, 2023). Dinamika proses pemilu seringkali mencerminkan kerumitan dalam masyarakat, termasuk konflik politik, identitas etnis, agama, dan stratifikasi sosial. Oleh karena itu, pemilu bukan semata-mata tentang pemilihan pemimpin, melainkan juga mencerminkan aspirasi serta perubahan politik yang terjadi dalam masyarakat (Sumual *et al.*, 2023).

Selain itu, pemilu juga menjadi instrumen penting bagi negara dalam mengokohkan prinsip-

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 5, Number 4, December 2024 / nivedana@radenwijaya.ac.id

prinsip demokrasi dan menjaga stabilitas politik. Hal ini didukung oleh pernyataan Sulistiono dan Boediningsih (2023) “pemilu merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang berdasar pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945”. Dengan adanya pemilu yang transparan dan adil, pemerintah dapat meningkatkan legitimasinya di mata rakyat. Tak hanya itu, pemilu yang berkualitas juga menjamin pergantian kekuasaan secara damai, menghindarkan potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas serta kemajuan suatu negara. Dengan demikian, pemilu menjadi landasan utama dalam menjaga keberlangsungan sistem politik yang demokratis dan berkelanjutan (Nurfadilla dan Nurdin, 2024).

Salah satu contoh kasus yang sedang terjadi adalah berlangsungnya pemilihan umum di Indonesia, di mana calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, berhasil meraih suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan hasil *real count*. Dengan unggulnya hasil perhitungan suara yang saat ini sedang berlangsung, masyarakat mulai meletakkan perhatiannya pada program yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Berkaitan dengan itu, program unggulan Prabowo-Gibran disebut sebagai 8 Program Hasil Terbaik Cepat, yakni program prioritas yang dijanjikan untuk segera dijalankan apabila Prabowo-Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024—2029. Berdasarkan kampanye paslon 02, beberapa program unggulannya adalah pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan desa, dan pemberian makan siang dan susu gratis kepada anak-anak Indonesia.

Walaupun demikian, salah satu program unggulan tersebut, yaitu makan siang dan susu gratis, menimbulkan banyak pertanyaan karena berkaitan dengan anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, total pembiayaan penuh dari program makan siang tersebut dapat memakan biaya hingga 400 triliun rupiah kepada 82 juta anak Indonesia dalam 1 tahun (Avisena, 2024). Akibatnya, muncul spekulasi seperti penggunaan dana biaya operasional sekolah (Dana BOS) untuk makan siang. Berdasarkan data dalam video berita oleh CNBC Indonesia, dana BOS pada tahun 2024 hanya mencakup sekitar 53 Triliun dengan target sekitar 419.218 sekolah. Artinya, dana BOS hanya mampu menutupi sekitar seperempat dari pembiayaan makan siang gratis.

Penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi, yaitu analisis hubungan antara khalayak dengan media massa. Khalayak diposisikan sebagai pihak yang menerima informasi dan

mengartikan isi dari sebuah teks yang dibentuk oleh media. Berikutnya, para khalayak diberi pertanyaan mendasar seperti bagaimana audiens dapat mengartikan isi pesan tersebut (Hall *et al.* 1972:128-138). Hal ini dikemukakan kembali oleh McQuail (2004) bahwa “analisis resepsi mengidentifikasi pengaruh konteks yang diberikan oleh media massa dan bagaimana khalayak menafsirkan konteks berita tersebut”. Salah satu contoh penelitian yang menggunakan pendekatan analisis resepsi adalah Gitasela *et al.* (2023) pada *Analisis Resepsi Khalayak Tentang Aplikasi Mypertamina (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)*. Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dengan teknologi dan persepsi mereka terhadap kebijakan pemerintah terkait bahan bakar. Studi tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua khalayak menerima pesan aplikasi secara seragam; beberapa audiens memaknainya secara oposisi atau negosiasi, sesuai dengan kerangka analisis resepsi. Dalam analisis resepsi, terdapat metode yang disebut sebagai “*encoding-decoding*”, yaitu kegiatan dalam proses produksi yang mengaitkan sang penyiar berita (pihak penyandi) dengan khalayak (pihak penerima) yang memecahkan isi dari berita tersebut.

Berkaitan dengan itu, peneliti menerapkan analisis resepsi yang menggunakan metode *encoding-decoding* untuk mengetahui beragam interpretasi khalayak dari berita mengenai kebijakan makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon nomor 2, Prabowo-Gibran. Dalam hal ini, khalayak tentu menginterpretasi berita tersebut dengan makna yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan pada lingkungan, sosial budaya, dan pengalaman pribadi.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui interpretasi khalayak terhadap pemahaman pesan dalam pemberitaan program makan siang gratis yang direncanakan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 dalam portal berita Kompas.com, “Ekonom Sebut Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan observasi dan wawancara di wilayah Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan. Untuk dapat menganalisis interpretasi khalayak terhadap pemahaman pesan oleh media, teori komunikasi yang cocok digunakan adalah teori *encoding-decoding* dari Stuart Hall. Teori komunikasi dari Stuart Hall juga digunakan dalam penelitian Dwiputra (2021) dalam *Analisis Resepsi Khalayak terhadap Pemberitaan COVID-19 di Klikdokter.com* dengan tujuan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat akan berita-berita mengenai COVID-19 di

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memberikan pandangan ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial masyarakat (Umanailo, 2019).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang merupakan metode untuk memahami secara mendalam kompleksitas yang ada dalam diri subyek, yang dalam hal ini adalah manusia serta kegiatannya. Menurut Creswell dan Poth (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dalam beberapa individu atau kelompok orang yang terpengaruh oleh kekhawatiran sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis resepsi dari Stuart Hall yang terdiri dari 3 kategori/posisi pemaknaan yaitu; posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi. Langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah pertama menentukan obyek penelitiannya yaitu teks berita makan siang gratis di kompas.com. kedua peneliti menentukan informan yang mana data penelitian akan diperoleh, informan ditentukan secara purposif sebanyak delapan (8) orang yaitu masyarakat di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Ketiga, peneliti menganalisis data hasil wawancara sesuai dengan kategori analisis resepsi.

Subjek dalam penelitian ini ialah 8 informan masyarakat yang berada di wilayah bintaro, memiliki latar belakang yang berbeda-beda berdasarkan tingkatan, jenis kelamin, suku, tempat tinggal dan organisasi yang diikuti. Informan yang peneliti jadikan sebagai informan yang terdiri dari 1. RH, 2. JR, 3. AP, 4. MF, 5. SB, 6. TF, 7. AE, 8. CA. 8 Masyarakat tersebut dipilih karena memenuhi kriteria sebagai Informan yang mengikuti tentang pemberitaan makan siang gratis.

Tabel 1 Data dan Profil Informan

Informan	Profil Informan
RH	24 tahun, Karyawan Swasta
JR	24 Tahun, Karyawan Swasta
AP	23 Tahun, Karyawan Swasta
MF	24 Tahun, Mahasiswa
SB	25 Tahun, Karyawan Swasta
TF	24 Tahun, Mahasiswa

AE	25 Tahun, Karyawan Swasta
CA	24 Tahun, Karyawan Swasta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil diperoleh menggunakan metode wawancara secara mendalam kepada beberapa informan dengan latar belakang yang berbeda pada rentang rata-rata usia 24 tahun. Selanjutnya, para informan memberikan jawaban dan pendapatnya masing-masing mengenai rumusan masalah, yakni pemaknaan program Makan Siang Gratis yang dirilis oleh Kompas.com. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada para informan, antara lain, adalah tanggapan mengenai program makan siang gratis, kemungkinan terealisasi program, hubungan antara masalah kesehatan dengan program makan siang gratis, prioritas program makan siang gratis ketimbang IKN, dan naiknya pajak akibat *burden sharing* untuk membantu merealisasikan program.

Penerimaan dan Pemaknaan Informan tentang pemberitaan Program Makan Siang Gratis yang dirilis oleh Kompas.com

1. Posisi Dominan

Menurut Ghassani dan Nugroho (2019), keadaan di mana pesan yang disiarkan oleh media dapat dipahami dan diterima secara penuh oleh khalayak disebut sebagai pemaknaan dominan. Hal ini dapat dikategorikan saat audiens sepenuhnya menerima pesan yang disampaikan oleh media sesuai dengan niat pembuat media. Contohnya, penerimaan hegemonik muncul ketika peserta menunjukkan empati atau berubah pandangan terhadap program Makan Siang Gratis setelah membaca berita dan menunjukkan penerimaan narasi yang dibentuk oleh berita.

Menurut (AE) yang telah melihat berita tersebut, Kompas hanya menjelaskan dari satu perspektif saja (pemerintah) sehingga berita ini seolah-olah menggiring masyarakat untuk ikut sependapat bahwa makanan gratis itu lebih penting daripada IKN. Sebaiknya, Kompas juga memasukkan pernyataan dari perspektif lainnya yang kontra terhadap berita tersebut agar dapat terlihat netral. (AP) berpendapat bahwa berita dari Kompas.com ini cenderung berpihak kepada pemerintah yang sekarang dibandingkan dari media berita yang lain. Hal ini juga didukung oleh isi berita yang mengedepankan program pemerinta, bahkan disampaikan dengan bahasa yang

sangat tepat. (MF) juga memberikan opini yang serupa, yakni berita yang disajikan oleh Kompas.com ini cenderung mendukung pemerintah. Dukungan tersebut terlihat dari penyajian berita yang dianggap mempromosikan program dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto jika dibandingkan dengan media berita lainnya. Menurut (JR), berita yang disajikan memiliki narasi untuk mendukung pemerintah karena belum ada konteks yang kontra ataupun netral di dalamnya. Selanjutnya, (SB) menyatakan bahwa berita yang dirilis oleh Kompas.com ini memang lebih pro kepada pemerintah daripada sumber berita lainnya. Ia juga berpendapat bahwa Kompas.com masih lebih unggul dari media berita yang lain. Selain itu, (CA) juga menanggapi mengenai judul berita dan isi yang dibuat oleh Kompas.com. Ia menilai bahwa berita ini cukup bagus dibandingkan dengan berita yang telah dibaca sebelumnya. Hal ini didukung oleh kredibilitas yang cukup baik dan berita-berita yang sangat mendukung pada program pemerintah.

2. Posisi Negosiasi

Di satu pihak, pemaknaan negosiasi adalah kondisi di mana khalayak atau audiens menerima pesan yang disampaikan, tetapi terdapat pengelakkan dalam beberapa hal tertentu. Penolakan tersebut biasanya terjadi karena sang penerima pesan menyesuaikan terhadap penerapan hukum, lingkungan, budaya, dan pengalaman yang telah dialami (Ghassani & Nugroho, 2019). Posisi negosiasi terjadi ketika audiens menerima sebagian dari pesan media, tetapi menafsirkannya dengan cara yang menggabungkan pengalaman pribadi atau pandangan dunianya masing-masing. Ini terlihat ketika peserta diskusi setuju dengan beberapa aspek yang disampaikan berita, tetapi juga menyampaikan keraguan atau kritiknya sendiri.

Dalam hal ini, (TF) memaknai bahwa berita yang dirilis oleh Kompas.com ini cukup lebih netral dibandingkan dengan yang lain. Ia menambahkan bahwa Kompas.com berada pada pihak pemerintah, tetapi masih memberikan pernyataan oposisi dalam penulisannya.

3. Posisi Oposisi

Menurut Wahyuni dan Narti (2020), kondisi pemaknaan oposisi terjadi saat konsumen atau penerima berita mengalami perbedaan kerangka konsep dari penyiar berita. Akibatnya, khalayak menyatakan posisi tidak setuju atau menolak pesan yang disampaikan secara utuh. Posisi oposisional terjadi ketika audiens secara aktif menolak dan menantang pesan yang disampaikan oleh media. Meskipun transkrip tidak menunjukkan penolakan murni terhadap narasi berita, ada indikasi skeptisisme yang bisa dianggap mendekati posisi ini, terutama ketika peserta

mengekspresikan keraguan tentang narasi atau tujuan program Makan Siang Gratis.

Menurut (RH), Kompas.com agak kurang cocok dalam menyiarkan berita dengan judul ini karena pemerintah seakan-akan dituntut untuk memprioritaskan pada satu program saja. Padahal, pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan pembangunan IKN dan melaksanakan program makan siang gratis secara beriringan.

Pemaknaan Informan tentang terealisasinya program makan siang gratis pada Kompas.com

1. Posisi Dominan

(JR) menyatakan bahwa program ini dapat terealisasi. Akan tetapi, pemerintah wajib memberi perhatian kepada target dan kesterilan dari makanan-makanan yang disajikan agar memenuhi gizi anak-anak. Dengan demikian, program ini dapat dinilai baik oleh masyarakat. Lebih lanjut, (SB) berpendapat bahwa program ini bisa terealisasi jika pemerintah memang benar-benar niat dengan program ini dan tidak dikorupsi. Jika melihat kondisi saat ini, ia berharap program ini sesuai dengan targetnya, yaitu distribusi ke seluruh Indonesia, bukan hanya ke sebagian pulau saja. (CA) pun berpendapat bahwa program ini dapat terealisasi. Hal utama dari program ini adalah distribusi dan pengeluaran anggaran yang tepat sasaran dan tidak adanya korupsi saat program ini berjalan.

2. Posisi Negosiasi

(TF) menilai bahwa GDP negara ini sudah cukup naik dan program ini bisa saja dijalankan. Akan tetapi, komunikasi dari pusat ke cabang atau daerah itu dinilai masih belum efektif. Jadi, perlu waktu beberapa tahun hingga program ini bisa berjalan sesuai ekspektasi. Selain itu, (AE) menilai bahwa program ini dapat terealisasi. Namun, perlu waktu yang cukup lama dan berperiode. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa program makan siang gratis ini berhenti karena menggunakan anggaran yang sangat besar. Di satu sisi, (RH) menyatakan bahwa program ini dapat terealisasi, tetapi tidak secara penuh. Hal ini didasari atas faktor oknum-oknum tidak bijak yang menggunakan dana dari program ini. Akibatnya, program ini tidak bisa berjalan dengan lancar.

3. Posisi Oposisi

Menurut (AP), program makan siang gratis ini cukup sulit untuk direalisasikan. Saat ini,

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 5, Number 4, December 2024 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Indonesia sedang mengalami deflasi yang membuat keadaan makin sulit dan perputaran uang menurun. Jika pemenuhan biaya dari program ini diambil dari pajak, hal itu akan membuat kondisi masyarakat makin sulit dan berpotensi tidak tepat sasaran. (MF) berpendapat bahwa program ini sulit untuk dijalankan karena jumlah anak-anak yang bersekolah di Indonesia sangatlah banyak. Akibatnya, program ini dapat membuat anggaran negara membengkak.

Pemaknaan informan pada portal berita Kompas.com tentang makan siang gratis dinilai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada di Indonesia.

1. Posisi Dominan

(AP) menilai bahwa makan siang gratis ini dapat mengurangi *stunting* dan kekurangan gizi pada anak-anak karena dapat memberikan asupan nutrisi yang baik, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. (SB) berpendapat bahwa makan siang gratis bisa mengatasi sebagian masalah kesehatan di Indonesia, salah satunya adalah menurunkan tingkat *stunting* dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh busung lapar dan asam lambung.

2. Posisi Negosiasi

Menurut (CA), program makan siang gratis dapat mengatasi masalah kesehatan asalkan bahan-bahan yang diberikan memenuhi standar kelayakan dan menyehatkan. Para orang tua pun harus memberikan pengawasan kepada anak-anaknya. Akan tetapi, program ini masih belum cukup untuk mengatasi masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari diri sendiri dan edukasi dari pemerintah terhadap kesehatan orang tuanya juga. (AE) menilai bahwa program ini dapat mengatasi hal tersebut, terutama jika diberikan kepada anak-anak yang masih dalam fase pertumbuhan. Hal ini dapat membantu mengurangi angka *stunting*. Namun, perlu perhitungan secara spesifik mengenai berapa biaya yang dikeluarkan dan makanan apa yang diberikan agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Menurut (RH), program ini dapat mengatasi masalah kesehatan, tetapi hanya untuk jangka pendek saja. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah seharusnya memberikan program pendidikan gratis. Program pendidikan gratis mendukung masyarakat untuk lebih mengenal masalah kesehatan dan penyebabnya. Dengan demikian, kualitas masyarakat yang meningkat menyebabkan meningkatnya pengetahuan tentang gizi dan bagaimana menjaga pola hidup sehat.

3. Posisi Oposisi

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 5, Number 4, December 2024 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Dalam hal ini, (JR) menilai bahwa masalah kesehatan tidak bisa diperbaiki oleh makan siang gratis saja. Perlu adanya pola makan teratur, yaitu tiga kali sehari, agar mendapatkan gizi yang sesuai. Pemberian makan siang gratis saja masih kurang untuk asupan bergizi bagi anak-anak. Menurut (TF), program ini masih kurang dalam mengatasi masalah kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah. Hal ini terlihat dari biaya anggaran yang rendah sehingga berpotensi kurangnya asupan gizi yang diberikan. Menurut (MF), untuk mengatasi masalah kesehatan, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada makan siang gratis. Ini hanya berlaku bagi masyarakat menengah ke bawah saja. Kualitas dan kebersihan makanannya pun masih dipertanyakan. Di pihak lain, bagi masyarakat menengah ke atas, program ini tidak dianggap begitu penting karena para orang tua sudah bisa menyediakan makan siang untuk anaknya masing-masing.

Pemaknaan informan terhadap Ekonom Soedrajad mendahulukan makan siang gratis dibandingkan dengan IKN pada portal berita Kompas.com

1. Posisi Dominan

Menurut (MF), ia sependapat dengan pernyataan Soedrajad bahwa makan siang gratis lebih diutamakan daripada pembuatan IKN. IKN sendiri merupakan program dari pemerintahan sebelumnya, sedangkan program makan siang gratis merupakan program besar dari pemerintahan saat ini. (JR) menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan Soedrajad. Ia menyatakan bahwa kedua program ini tidak memiliki urgensi yang tinggi. Akan tetapi, ia menilai bahwa program makan siang gratis lebih baik didahulukan daripada pembangunan IKN karena pembangunan IKN sudah sangat pesat. Akibatnya, perlu prioritas untuk menjalankan program makan siang gratis sehingga kedua program ini dapat berjalan beriringan. (SB) berpendapat bahwa pernyataan Soedrajad masuk akal. Melihat bahwa kedua program tersebut merupakan program dengan anggaran yang besar, pemerintah perlu memprioritaskan salah satu program terlebih dahulu. Dengan demikian, setelah kedua program dapat berjalan dengan setara, pemerintah dapat fokus pada keberlanjutan program lainnya.

2. Posisi Negosiasi

(CA) berpendapat bahwa walaupun itu bisa terlaksana dengan baik dan targetnya tepat, boleh saja ngomong kalau makan siang gratis lebih didahulukan daripada proyek ikn, dengan tujuan mencerdaskan, memperbaiki gizi anak anak bangsa. Asalkan juga tepat sasaran, berjalan

dengan baik, dan juga makanan nya jelas. Jika kita bicara makan siang gratis lebih didahulukan daripada proyek iKN, tidak bisa di benarkan juga, IKN ini adalah proyek besar, dan harus di kerjakan maksimal. Kalau setengah setengah percuma, Sebaiknya langkah yang harus diambil balance aja, antara makan siang gratis dengan proyek IKN menurut saya. (AE) menyatakan bahwa pernyataan yang diberikan oleh Soedrajad membuat saya berpikir bahwa seharusnya tidak ada yang didahulukan, kedua hal ini penting - IKN sebagai ikon masa depan Indonesia, begitu juga dengan makan siang gratis untuk mencegah anak kecil dari stunting. Sehingga bagaimanapun caranya, kedua hal ini harus saling berjalan secara bersamaan.

3. Posisi Oposisi

Menurut (AP), ia menilai pernyataan soedrajad sangat kurang tepat dan harus memilih solusi lain agar program ini setara pentingnya dan tidak ada yang di dahulukan atau berjalan sendiri – sendiri. Namun, jikalau harus memilih, ia akan memilih makan siang gratis karena lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat menengah kebawah yang butuh asupan gizi yang cukup dibandingkan dengan infrastruktur IKN. Bagi (RH), ini agak sulit, meskipun yang langkah diusulkan oleh ekonom ini harus dijalankan secara satu persatu, ini akan menjadi tidak maksimal. Jika pemerintah berfokus program pada makan siang gratis, ditakutkan pembangunan IKN akan menjadi terhambat atau lebih parah lagi mangkrak. Seharusnya ekonom Soedrajad punya usulan untuk solusi dan opsi dalam menyeimbangkan hal ini. (TF) menilai bahwa pernyataan Soedrajad ini harus dikaji ulang. Karena program makan siang gratis ini juga akan berpengaruh pada perubahan iklim, begitu juga dengan pembangunan IKN. Karena heatwave di Indonesia itukan sudah cukup parah, seharusnya ada solusi untuk hal ini. Bukan hanya untuk makan siang gratis dan infrastruktur IKN saja. Saya malah lebih mementingkan kepada keseimbangan suatu negara dibandingkan dengan menjalankan program satu per satu.

Penerimaan Informan mengenai kenaikan pajak akibat makan siang gratis dengan opsi ekonom menggunakan burden sharing dengan Bank Indonesia pada portal berita Kompas.com

3. Posisi Oposisi

(MF) Untuk kenaikan pajak, ia menyatakan perlu adanya evaluasi lebih lanjut, karena beban masyarakat udah terlalu berat kalau pajak harus dinaikkan dan burden sharing dengan bank indonesia, itu seharusnya dibalikkan lagi dengan keputusan menteri keuangannya karena

pembiayaan program ini bisa saja menggunakan sumber dana lain tanpa harus menaikkan pajak dan membebarkannya ke masyarakat. Menurut (AP) ia tidak suka dan tidak akan pernah menyetujui program ini. Karena ini adalah program yang dipromosikan oleh pemerintah. Selain itu, kenapa harus dibebankan ke seluruh masyarakat Indonesia sampai dengan menaikkan pajak? kenapa BI tidak bisa menanggung ini dan mengkalkulasi pajak lebih baik dari sebelumnya. Seharusnya pemerintah punya opsi lain selain menaikkan pajak sebagai pendanaan makan siang gratis ini. (JR) menilai bahwa kenaikan pajak itu sendiri perlu dipertimbangkan lagi, terutama pada masyarakat menengah kebawah yang akan terbebani dengan naiknya jumlah pajak ini sedangkan dengan opsi burden sharing dengan bank Indonesia sebaiknya tidak perlu karena uang yang dimiliki bank Indonesia itu seharusnya sangat besar dan mereka sangguplah untuk mengatasi ini. (RH) berpendapat bahwa menaikkan pajak negara itu sama saja membebankan kelas menengah dan kebawah bahkan dapat menurunkan tingkat kelas masyarakat. Apalagi anak muda sekarang ini punya tabungan tetapi hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sementara kebutuhan lainnya tidak terpenuhi karena efek dari naiknya pajaknya ini nantinya. Menurut (SB) kenaikan pajak ini tidak hanya membebankan kepada masyarakat kelas menengah kebawah saja, tetapi masyarakat kelas atas pun kena juga meskipun tidak signifikan, lalu juga adanya burden sharing dengan bank Indonesia seharusnya dapat mengurangi hal tersebut tanpa harus menaikkan pajak dan perlu dipertimbangkan secara matang. (TF) menyatakan bahwa hal ini cukup bahaya. Kalau yang ia lihat, karena inflasi ini lebih parah ditambah karena cadangan makanan kita tidak memumpuni dan harus import dari beberapa negara. Ia menilai Global Food Shortages sudah kelihatan di negara Indonesia. Ia menambahkan adanya kajian ulang rencana untuk makan siang gratis ini. Karena menurutnya, ini bahaya, apalagi sampai menaikkan pajak, kasihan warga menengah kebawah hidupnya jadi susah karena pajak. (CA) menyatakan bahwa opsi menaikkan pajak untuk proyek makan siang gratis ini sebaiknya diperhatikan lagi. Ini maksudnya kan dengan menggunakan opsi burden sharing dengan BI juga kan itu termasuk pergerakan yang besar. Terkadang, kalau di lihat secara objektif, penggunaan pajak untuk proyek makan siang gratis sepertinya akan terlihat negatif oleh mayoritas rakyat Indonesia. Menurutnya, proyek ini masih dalam tahap pengembangan atau percobaan, alangkah baiknya dilihat dulu, bisa disisihkan pakai APBN. Menurut (AE), ia kurang sependapat dengan metode Burden Sharing ini. Secara langsung, seluruh rakyat ikut serta dalam membayar pajak tersebut, tetapi efek timbal balik

belum tentu balik ke diri kita masing-masing. Artinya, rakyat menengah kebawah hingga ke atas harus ikut serta dalam membayar dan ini jelas akan membebankan pagi kaum yang tidak mampu. Mungkin pemerintah harus mencari metode alternatif lainnya yang dapat meringankan pembiayaan sehingga bisa diterima dari segala kalangan sebelum mengfinalisasikan metode tersebut.

Tabel 2 Data setelah Dianalisis

No	Informan	Q1			Q2			Q3			Q4			Q5		
		D	N	O	D	N	O	D	N	O	D	N	O	D	N	O
1	RH			✓		✓			✓				✓			✓
2	JR	✓			✓					✓	✓					✓
3	AP	✓					✓	✓					✓			✓
4	MF	✓					✓			✓	✓					✓
5	SB	✓			✓			✓			✓					✓
6	TF		✓			✓				✓			✓			✓
7	AE	✓				✓				✓		✓				✓
8	CA	✓			✓				✓			✓				✓
Dominan = 14																
Negosiasi = 8																
Oposisi = 18																
Total = 40																

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 8 informan yang telah diwawancara, dapat diketahui bahwa terdapat 14 pernyataan dominan, 8 pernyataan negosiasi, dan 18 pernyataan oposisi. Hal ini menunjukkan bahwa para informan memiliki pandangan atau pemaknaan yang berbeda dengan penyampaian yang diberikan oleh Kompas.com karena menganggap langkah yang diambil oleh pemerintah masih kurang efektif dan efisien. Di satu sisi, terdapat pula posisi dominan dari khalayak yang menyatakan bahwa program ini dapat membantu masyarakat kelas menengah ke bawah dan dapat menurunkan angka *stunting* pada anak-anak sekolah. Akan tetapi, hal yang perlu

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 5, Number 4, December 2024 / nivedana@radenwijaya.ac.id

diingat adalah masalah kesehatan di Indonesia tidak hanya dapat diselesaikan dengan program makan siang gratis. Perlu adanya penyuluhan informasi kepada para orang tua untuk memberikan asupan bergizi kepada anak-anaknya.

Peneliti berharap bahwa pemerintah dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien, serta menjalankan programnya secara bersungguh-sungguh tanpa adanya korupsi. Hal ini tentu mendukung keberhasilan dari program-program yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaranggana, P. (2024, Maret 31). Ekonom Sebut Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN. Kompas. https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/31/113203665/ekonom-sebut-program-makan-siang-gratis-lebih-penting-dari-ikn-ini?page=all#google_vignette
- Avisena, M. I. R. (2024, Februari 27). Indef: Dana Jumbo Makan Siang Gratis Lebih Baik Dialihkan untuk Hal Produktif. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/654781/indef-dana-jumbo-makan-siang-gratis-lebih-baik-dialihkan-untuk-hal-produktif>
- Cangara, H. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. New York: SAGE Publication
- Dwiputra, K. O. (2021). *Analisis resepsi khalayak terhadap pemberitaan Covid-19 di klikdokter.com*. Jurnal Komunikasi Profesional, 5(1).
- Erciyas, E. (2020). Paradigms of inquiry in the qualitative research. *European Scientific Journal, ESJ*, 16(7), 181—200.
- Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 51-59.
- Gitasela, Y., Yanto, Y., & Narti, S. (2023). Analisis Resepsi Khalayak Tentang Aplikasi MyPertamina (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 405-. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4331>.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Kabupaten Sukoharjo: Penerbit Tahta Media.
- Hall, S., Hobson, D., Lowe, A., & Willis, P. (1972). Coding/decoding. *Culture, Media, Language. Working Papers in Cultural Studies*, 79, 128-138
- Ida, R. (2010). *Metode Penelitian Studi Media dan Budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Kamuli, S., Latore, S., & Sahi, Y. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 5, Number 4, December 2024 / nivedana@radenwijaya.ac.id

- Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158-3170.
- McRobbie, Angela. (1992). *Post-Marxism and Cultural Studies: A Post Script*. Dalam Lawrence Grossberg dan Paul Treichler (eed.), *Cultural Studies*. London & New York: Routledge.
- McQuail, D. (2004). With More Hindsight: Conceptual Problems and Some Ways Forward For Media Use Research. *Action Theory and Communication Research: Recent Developments in Europe*, 3, 35.
- Melati, C., Prasetya, A. P., & Martriana, P. S. (2015). Analisis Resepsi Komunikasi Politik di Instagram @ridwankamil. *Imagining e-Indonesia: Local Wisdom in the Midst of Media Technology and Communication Policy*, 115.
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 44-49.
- Ross, K., & Nightingale, V. (2003). *Media and audiences: New perspectives*. McGraw-Hill Education (UK).
- Stansfield, M. (2001). *Introduction to Paradigms: Overview, Definitions, Categories, Basics, Optimizing Paradigms and Paradigm Engines*. Texas: Trafford Publishing.
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 333-345.
- Sumual, A. K., Lontaan, M. G., & Supit, Y. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(2), 103-112.
- Toni, A. A., & Fajariko, D. (2017). Studi Resepsi Mahasiswa Broadcasting Universitas Mercu Buana Pada Film Journalism “Kill The Messenger”. *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 151-163.
- Umanailo, M. B. C. (2019). Paradigma Postmodern. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://osf.io/preprints/dukfs/>
- Wijaya, A. (2024, Maret 4). Dana BOS Buat Makan Siang Gratis, Gak Bahaya Tah?. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240304115341-8-519400/video-dana-bos-buat-makan-siang-gratis-gak-bahaya-tah>